

**ANALISIS BELANJA PADA ANGGARAN  
PENDAPATAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN AGAM PERIODE 2006-2008**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan  
untuk Menyelesaikan Program Diploma IV, dan  
Untuk Menaruh Gelar Sarjana Sains Terapan  
Politeknik Universitas Andalas Padang*

Oleh :

**JAFRIL**  
**06096021**



**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**



No. Alumni Universitas

J A F R I L

No. Alumni Fakultas

**BIO DATA**

a). Tempat/Tanggal Lahir: Padang, 3 September 1971, b). Nama Orang Tua : Jamaluddin (alm), c) Fakultas : Politeknik, d). Jurusan : Akuntansi Pemerintahan, e). No. BP.: 06096021 f). Lulus : 27 Agustus 2009, g). Predikat Lulus: , h). IPK :5,66, i). Lama Studi : 32 (Tiga dua) bulan, j). Alamat Orang Tua : Jl. Karang Ganting No. 34 Kel. Lb. Lintah kee. Kuranji Padang, Sumatera Barat.

**ANALISIS BELANJA PADA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN AGAM PERIODE 2006-2008**

Tugas Akhir oleh: J A F R I L

Pembimbing I: DEDY DJEFRIS, SE.,M.Ak.,Ak. Pembimbing II: SUKARTINI, SE.,M.Kom.,Ak.

**ABSTRAK**

APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Untuk mengukur apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif diperlukan analisis. Analisis yang biasa dilakukan berupa: analisis belanja varians, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, dan analisis belanja per fungsi. Dari hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, Pemerintah Kabupaten Agam selalu melakukan penghematan terhadap penggunaan dana dari anggaran (APBD). Ini menunjukkan adanya usaha penda tersebut melakukan tindakan efisiensi. Namun, secara keseluruhan, belanja yang dikeluarkan penda tersebut bertambah tiap tahun.

Tugas Akhir telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 27 Agustus 2009.

Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Tanda Tangan	1	2	3	4
Nama Terang	GUSTATI, SE.,Ak.	DESI HANDAYANI, SE.,Ak.	ULFI MARYATI, SE.,M.Ak.,Ak.	DEDY DJEFRIS, SE.,M.Ak.,Ak.

Mengetahui:  
Ketua Jurusan NURUL FAUZI, SE.,MM.,Ak.  
Nama



Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus:

Nomor Alumnus Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumnus Universitas	Nama	Tanda Tangan

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas berbantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Kedua Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,
2. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, dan,
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Agar tujuan-tujuan dalam otonomi daerah dapat tercapai, Pemerintah haruslah bertindak efektif dan efisien dalam mengelola keuangan daerahnya. Untuk memberikan jaminan dialokasikannya sumber daya input secara ekonomis, efisien dan efektif, maka

diperlukan informasi akuntansi manajemen yang sangat penting dimiliki, seiring dengan adanya paradigma baru organisasi pemerintahan yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat dan kepentingan publik.

Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar keputusan ekonomi, sosial dan politik. Meskipun laporan keuangan sudah bersifat *general purposive*, artinya dibuat lebih umum dan sesederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan keuangan tersebut dengan baik. Tidak semua pemangku kepentingan memahami akuntansi yang merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan. Bahkan mungkin ada beberapa pihak yang sama sekali tidak tertarik dengan laporan keuangan. Hal itu wajar karena latar belakang yang sangat bervariasi diantara pemangku kepentingan.

Karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan itu untuk pembuatan keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu cara memahami laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan dan bagaimana informasi keuangan untuk mengambil keputusan.

Terdapat beberapa metode dalam analisis laporan keuangan. Satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Terdapat berbagai jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasi laporan keuangan. Hasil dari perhitungan rasio-rasio keuangan

perlu diinterpretasikan, sehingga darinya dapat dievaluasi kinerja keuangan organisasi dan selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan tertentu.

Penulis memilih Kabupaten Agam sebagai lokasi penelitian, karena berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari berbagai sumber di internet, pada tahun 2006, laporan keuangan pemerintah kabupaten tersebut mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada saat itu, opini WDP merupakan opini paling baik yang diberikan oleh BPK pada laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Selain itu, penulis juga mempertimbangkan kemudahan akses untuk memperoleh data di kabupaten tersebut dibanding beberapa daerah lain yang juga mendapat opini WDP.

Sedianya, data yang akan penulis olah dalam penelitian ini adalah dari tahun 2004 sampai 2008. Namun pegawai di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Agam yang bertanggung jawab dalam hal pelaporan keuangan, menyatakan bahwa berkas data tahun 2004 dan 2005 tidak ada lagi. Oleh sebab itu, penelitian ini terpaksa hanya berasal dari data tahun 2006-2008.

Dikarenakan pentingnya analisis laporan keuangan terutama analisis belanja bagi pengambil keputusan, dalam hal ini pemda yang pada dasarnya menggunakan dana publik dalam membiayai aktivitasnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan hal tersebut dengan judul "ANALISIS BELANJA PADA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN AGAM PERIODE 2006-2008".

## **1.2. PERUMUSAN MASALAH**

- a. Bagaimana proporsi belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Agam;

- b. Bagaimana pertumbuhan belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Agam;
- c. Bagaimana proporsi belanja per fungsi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Agam.

### **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui proporsi belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Agam ;
- b. Mengetahui pertumbuhan belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Agam ;
- c. Mengetahui proporsi belanja per Fungsi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Agam .

### **1.4. KONTRIBUSI PENELITIAN**

- a. Bagi penulis

Setelah melakukan penelitian ini, diharapkan penulis memahami tingkat pertumbuhan belanja, proporsi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan proporsi belanja per fungsi pada pemerintah daerah.

- b. Bagi pendidikan

Secara akademis penelitian ini bermanfaat dalam memberikan pemahaman dan masukan bagi peneliti lainnya yang tertarik membahas analisis belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah

- c. Bagi pemerintahan

## BAB LIMA

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. KESIMPULAN

1. Pada tahun 2006 Anggaran belanja terserap adalah 79,69 %, penghematan belanja yang dilakukan adalah sebesar Rp111.141.691.991, atau 20,31% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Agam. Jumlah penghematan yang terkecil ditemukan pada belanja bagi hasil yaitu sebesar 87,33% dan yang terbesar ditemukan pada belanja tidak terduga sebesar 40%.
2. Pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Agam menetapkan anggaran sebesar Rp591.987.440.972 sementara realisasinya cuma Rp490.395.798.434 berarti anggaran belanja yang terserap 82,84%, penghematan belanja yang dilakukan dalam tahun 2007 sebesar Rp101.591.642.538, atau 17,16% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Realisasi Belanja tahun pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Agam adalah sebesar Rp574.493.139.047 dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp661.938.559.247, dan terdapat selisih sebesar Rp87.445.420.200. Anggaran belanja yang terserap 86,79%, Penghematan belanja yang dilakukan dalam tahun 2008 sebesar Rp87.445.420.200, atau 13,21% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Agam.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Agam dari tahun ke tahun selalu bertambah. Dengan menggunakan tahun dasar

## DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul (2002) Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat

Mahmudi (2007) Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Mardiasmo (2002) Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

-----, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

-----, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

-----, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

-----, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

-----, Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

-----, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

-----, Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Suwardjono (2003) Akuntansi Pengantar: Proses Penciptaan Data Pendekatan Sistem, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

Suwardjono (2005) Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

[www.Kabupaten-Agam.go.id](http://www.Kabupaten-Agam.go.id)